

Menghentikan Regres Tanpa Akhir: Subjek Moral Transenden sebagai Jawaban Kristen atas Kegagalan *Distributed Moral Responsibility* dalam Etika Bisnis Berbasis AI

Avi Christian

Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, Tangerang

Correspondence: avi@hits.ac.id

Abstract

This article examines the conceptual failure of Luciano Floridi's distributed moral responsibility model in explaining moral accountability within AI-driven business systems. When business decisions such as loan denials, employment terminations, or exploitative dynamic pricing are made by algorithms, moral responsibility tends to disperse across a long chain of actors, from developers and corporations to regulators and users, producing an infinite regress in which no single party can genuinely be held accountable. Through a critical dialogue between Aristotelian and Kantian moral agency theory and Pauline theology in Romans 14:12, this article argues that Christian ethics offers a distinctive solution through the transcendent moral subject, namely God as final judge, who ontologically closes this regress. This framework does not replace existing legal and AI governance mechanisms but provides a theological foundation that prevents business actors from hiding behind the neutrality of algorithmic systems. The article offers practical implications in the form of personal accountability principles for Christian business practitioners in the age of automated decision-making.

Keywords: artificial intelligence, Christian business ethics, distributed moral responsibility, Romans 14:12, transcendent moral subject

Abstrak

Artikel ini mengkaji kegagalan konseptual model *distributed moral responsibility* yang diajukan Luciano Floridi dalam menjelaskan akuntabilitas moral pada sistem bisnis berbasis kecerdasan buatan. Ketika keputusan bisnis seperti penolakan pinjaman, pemutusan kontrak kerja, atau penetapan harga dinamis diambil oleh algoritma, tanggung jawab moral cenderung terdistribusi ke dalam rantai aktor yang panjang, mulai dari pengembang, korporasi, regulator, hingga pengguna, sehingga menciptakan regres tanpa akhir yang membuat tidak ada satu pihak pun benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui metode dialog kritis antara teori *moral agency* Aristotelian dan Kantian dengan teologi Paulus dalam Roma 14:12, artikel ini berargumen bahwa etika Kristen menawarkan solusi distingtif berupa subjek moral transenden, yakni Allah sebagai hakim akhir yang menutup regres tersebut secara ontologis. Kerangka ini tidak menggantikan mekanisme hukum dan tata kelola AI yang ada, melainkan menyediakan fondasi teologis yang menahan pelaku bisnis agar tidak bersembunyi di balik netralitas sistem algoritmik. Artikel ini menawarkan implikasi praktis berupa prinsip akuntabilitas personal bagi pelaku bisnis Kristen di era otomasi pengambilan keputusan.

Kata Kunci: etika bisnis Kristen, kecerdasan buatan; Roma 14:12, subjek moral transenden, tanggung jawab moral terdistribusi



PENDAHULUAN

Ketika kecerdasan buatan (AI) semakin terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis, mulai dari penilaian kelayakan kredit, sistem rekrutmen otomatis, hingga penetapan harga dinamis, muncul persoalan etis yang mendasar:¹ siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab ketika sebuah sistem algoritmik menghasilkan keputusan yang merugikan manusia? Andreas Matthias, dalam kajiannya yang menjadi rujukan awal diskursus ini, menunjukkan bahwa mesin pembelajar otonom (*learning automata*) menciptakan situasi baru di mana produsen atau operator mesin secara prinsip tidak lagi mampu memprediksi perilaku mesin tersebut, sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan antara menghentikan penggunaan teknologi tersebut, yang secara realistis tidak mungkin dilakukan, atau menerima adanya *responsibility gap* yang tidak dapat dijembatani oleh konsep pertanggungjawaban tradisional.² Persoalan ini semakin krusial dalam konteks bisnis karena keputusan algoritmik tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh langsung kesejahteraan manusia, mulai dari akses ekonomi, kelangsungan pekerjaan, hingga keadilan harga.³

Luciano Floridi, salah satu filsuf informasi paling berpengaruh dalam etika teknologi kontemporer, mengembangkan kerangka yang lebih luas melalui konsep "distributed morality." Ia berargumen bahwa dalam masyarakat informasi, tindakan moral tidak lagi dapat dipahami sebagai produk agen tunggal, melainkan sebagai hasil dari jejaring agen manusia dan nonmanusia yang saling berkelindan dalam sistem multiagen.⁴ Bersama J. W. Sanders, Floridi bahkan mengusulkan agar agen buatan (*artificial agents*) dapat dipandang sebagai agen moral tanpa harus memiliki kehendak bebas, keadaan mental, atau kapasitas pertanggungjawaban sebagaimana dipahami dalam tradisi filsafat moral klasik.⁵ Kerangka ini memberi kontribusi penting dalam memahami kompleksitas sistem algoritmik, namun ia meninggalkan persoalan yang belum terjawab tuntas: jika tanggung jawab moral tersebar ke seluruh jejaring aktor, mulai dari pengembang, korporasi, regulator, hingga pengguna akhir, maka pada titik mana pertanggungjawaban itu sesungguhnya berhenti? Filippo Santoni de Sio dan Giulio Mecacci bahkan mengidentifikasi bahwa persoalan ini bukan tunggal melainkan berlapis, mencakup sedikitnya empat jenis *responsibility gap* yang berbeda dalam sistem AI kontemporer, mulai dari gap kultural, moral, hingga hukum.⁶ Ketika tanggung jawab terus didistribusikan tanpa ada titik akhir yang jelas, yang terjadi bukanlah penyelesaian persoalan moral, melainkan regres tanpa akhir (*infinite regress*) yang secara efektif membebaskan setiap aktor dari akuntabilitas pribadi.

Dalam praktik bisnis, kekosongan konseptual ini berdampak nyata. Ketika sebuah platform fintech menolak pengajuan pinjaman melalui algoritma *credit scoring*, atau ketika sebuah perusahaan rintisan berbasis aplikasi menetapkan insentif kerja yang eksploitatif melalui sistem penentuan tarif otomatis, pelaku bisnis kerap berlindung di balik argumen

¹ D. A. Rismayadi et al., *Algoritma dan Data Driven Decision Making dalam Bisnis* (Alungcipta, 2025).

² Andreas Matthias, "The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata," *Ethics and Information Technology* 6, no. 3 (2004): 175-183.

³ Endah Pertiwi et al., *Hukum dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia* (PT Arunika Aksa Karya, 2025).

⁴ Luciano Floridi, "Distributed Morality in an Information Society," *Science and Engineering Ethics* 19, no. 3 (2013): 727-743.

⁵ Luciano Floridi and J. W. Sanders, "On the Morality of Artificial Agents," *Minds and Machines* 14, no. 3 (2004): 349-379.

⁶ Filippo Santoni de Sio and Giulio Mecacci, "Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why They Matter and How to Address Them," *Philosophy and Technology* 34, no. 4 (2021): 1057-1084.

bahwa keputusan tersebut merupakan produk sistem, bukan kehendak pribadi. Logika ini, betapapun secara teknis dapat dibenarkan dalam kerangka distribusi tanggung jawab sekuler, menciptakan kekosongan moral yang serius: tidak ada subjek yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan korban atas dampak keputusan tersebut.

Etika Kristen menawarkan resolusi konseptual atas kebuntuan ini melalui gagasan yang telah lama ada jauh sebelum persoalan AI muncul, yaitu konsep pertanggungjawaban personal di hadapan subjek moral transenden. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 14:12, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah." Ayat ini menempatkan Allah sebagai hakim akhir yang tidak dapat direduksi menjadi salah satu simpul dalam jejaring distribusi tanggung jawab, melainkan sebagai subjek moral yang menutup rantai pertanggungjawaban itu secara ontologis. Berbeda dari kerangka distributed moral responsibility yang bersifat horizontal dan berpotensi terus melebar tanpa batas, kerangka teologis ini menawarkan sumbu vertikal yang menahan setiap pelaku bisnis, baik pengembang sistem, pengambil kebijakan korporat, maupun pengguna, dari kemungkinan untuk bersembunyi di balik neutralitas algoritma.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk sekadar menempelkan prinsip etika Kristen secara aplikatif pada persoalan AI, sebagaimana kecenderungan sebagian besar literatur Kristen kontemporer tentang teknologi. Sebaliknya, artikel ini membangun dialog kritis antara teori *moral agency* yang berakar pada tradisi Aristotelian dan Kantian, yang mendasari sebagian besar hukum korporasi modern, dengan teologi akuntabilitas personal eskatologis dalam Roma 14:12. Melalui dialog ini, artikel ini berargumen bahwa kontribusi khas etika Kristen bukan terletak pada penyediaan mekanisme hukum atau tata kelola tambahan, karena hal tersebut telah banyak diusulkan dalam literatur tata kelola AI, melainkan pada penyediaan fondasi ontologis yang menghentikan regres tanggung jawab secara mendasar. Dengan kerangka ini, artikel ini pada akhirnya menawarkan implikasi praktis bagi pelaku bisnis Kristen dalam merumuskan prinsip akuntabilitas personal di tengah meluasnya otomasi pengambilan keputusan bisnis berbasis algoritma.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat interdisipliner, yang mempertemukan filsafat moral sekuler dengan eksegesis biblikal, karena persoalan yang dikaji bersifat konseptual dan tekstual, bukan empiris. Sumber data terbagi menjadi dua. Data primer berupa teks Alkitab, khususnya Roma 14:12 dalam bahasa Yunani dan terjemahannya, didukung oleh 2 Korintus 5:10 sebagai teks pendukung untuk tema akuntabilitas eskatologis. Data sekunder berupa karya filsafat moral klasik (Aristoteles dan Kant), filsafat korporasi (French), literatur etika AI kontemporer (Floridi dan Sanders, Matthias, Santoni de Sio, dan Mecacci), serta komentar eksegetis Surat Roma (Moo). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan verifikasi kritis atas sumber jurnal yang telah ditinjau sejawat serta komentari eksegetis yang diakui secara akademik.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap secara berurutan. Pertama, analisis konseptual atas kerangka *moral agency* sekuler (Aristotelian, Kantian, dan personifikasi korporasi Prancis), dihadapkan pada diagnosis Floridi, Sanders, dan Matthias mengenai kegagalannya di hadapan sistem AI. Kedua, eksegesis gramatikal historis atas Roma 14:12 memperhatikan konteks literer pasal 14, struktur argumen Paulus, serta makna leksikal

hekastos hemon dan *logon dosei*, dengan mengikuti prosedur eksegesis yang digariskan oleh Gordon Fee.⁷ Ketiga, sintesis kritis yang mendialogkan kedua kerangka untuk menunjukkan titik temu dan perbedaannya, guna merumuskan kontribusi distingtif etika Kristen serta implikasi praktisnya bagi pelaku bisnis Kristen.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori: Kegagalan Moral Agency Sekuler dalam Menutup Regres Tanggung Jawab

Diskursus filsafat moral Barat mengenai tanggung jawab (*moral agency*) memiliki akar panjang yang jauh mendahului persoalan kecerdasan buatan, namun kerangka tersebut menjadi fondasi tidak langsung bagi hukum korporasi modern dan, pada gilirannya, bagi cara masyarakat kontemporer memahami akuntabilitas dalam sistem bisnis berbasis algoritma. Bagian ini menelusuri dua tradisi utama, yaitu tradisi Aristotelian dan Kantian, sebelum menunjukkan bagaimana keduanya diperluas ke ranah korporasi melalui gagasan Peter French, dan pada akhirnya menuju diagnosis kontemporer Floridi, Sanders, dan Matthias mengenai kegagalan kerangka tersebut di hadapan sistem AI.

Aristoteles, dalam Etika Nikomakea, membangun konsep pertanggungjawaban moral berdasarkan gagasan tentang tindakan sukarela (*hekousion*). Menurutinya, seseorang hanya dapat dipuji atau dicela atas tindakan yang berasal dari dirinya sendiri, dilakukan dengan pengetahuan penuh tentang keadaan yang relevan, dan tidak dipaksakan oleh kekuatan eksternal.⁸ Kerangka ini mengandaikan sebuah subjek tunggal yang dapat ditelusuri sebagai sumber tindakan (*arche*), sehingga pertanggungjawaban dapat dilekatkan secara langsung pada agen yang melakukannya. Persoalan muncul ketika kerangka ini dihadapkan pada sistem algoritmik pembelajaran mesin, yang oleh sifatnya sendiri menghasilkan keluaran yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi bahkan oleh penciptanya. Jika prasyarat pengetahuan penuh atas tindakan menjadi syarat pertanggungjawaban moral sebagaimana diandaikan Aristoteles, maka pengembang sistem AI secara struktural berada dalam posisi yang sulit dimintai pertanggungjawaban penuh, karena mereka secara harfiah tidak dapat mengetahui sepenuhnya bagaimana sistem tersebut akan berperilaku di kemudian hari.

Immanuel Kant menempatkan pertanggungjawaban moral pada kapasitas rasional untuk bertindak berdasarkan hukum yang diberikan kepada diri sendiri (otonomi), bukan berdasarkan dorongan eksternal atau kecenderungan alamiah.⁹ Bagi Kant, hanya makhluk rasional yang mampu menetapkan maksim tindakan mereka sendiri secara bebas yang dapat dianggap sebagai subjek moral yang penuh. Kerangka ini secara implisit menyingkirkan sistem AI dari kategori agen moral, karena betapapun canggihnya sebuah algoritma, ia tidak memiliki kehendak bebas rasional dalam pengertian Kantian, melainkan hanya menjalankan fungsi optimasi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, di sinilah letak persoalannya dalam konteks bisnis kontemporer, karena jika AI bukan subjek moral, tanggung jawab seharusnya sepenuhnya kembali kepada manusia yang merancang dan menerapkannya. Dalam praktik, justru pada titik inilah

⁷ Gordon D. Fee, *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors*, 3rd ed. (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 1-12.

⁸ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, 2nd ed. (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), Book III.1, 1109b30-1111a1.

⁹ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 440-441.

pelaku bisnis sering menghindar, dengan mendalilkan bahwa keputusan yang dihasilkan sistem berada di luar kendali rasional mereka secara langsung.

Peter French memperluas kerangka moral agency dari individu ke entitas kolektif melalui argumen bahwa korporasi, karena memiliki struktur pengambilan keputusan internal, dapat dipandang sebagai agen moral yang autentik dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara independen dari anggota-anggotanya.¹⁰ Argumen ini memberi dasar konseptual bagi tanggung jawab hukum korporasi modern, namun juga membuka celah baru ketika diterapkan pada sistem berbasis AI. Jika korporasi dapat menjadi agen moral melalui struktur keputusan internalnya, dan jika struktur keputusan tersebut kini sebagian didelegasikan kepada sistem algoritmik, maka muncul pertanyaan apakah tanggung jawab moral korporasi juga ikut terdistribusi kepada sistem tersebut, atau justru semakin terkonsentrasi pada korporasi sebagai satu-satunya entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban. French sendiri tidak mengantisipasi skenario AI, sehingga kerangkanya perlu diperluas lebih jauh untuk menjawab persoalan kontemporer ini.

Ketiga kerangka di atas, meskipun berbeda penekanan, sama-sama mengandaikan adanya satu titik pertanggungjawaban yang dapat diidentifikasi secara jelas, baik pada individu, korporasi, maupun struktur keputusannya. Floridi dan Sanders menggugat asumsi ini dengan mengusulkan bahwa agen buatan dapat dipandang sebagai agen moral tanpa perlu memiliki kehendak bebas atau keadaan mental, sepanjang mereka mampu menghasilkan tindakan yang relevan secara moral dalam suatu sistem.¹¹ Sementara itu, Matthias menunjukkan secara lebih tajam bahwa mesin pembelajar otonom menciptakan *responsibility gap*, yaitu situasi ketika produsen atau operator secara prinsip tidak lagi dapat memprediksi perilaku mesin sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas konsekuensinya.¹² Floridi kemudian memperluas diagnosis ini melalui konsep *distributed morality*, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat informasi, tindakan moral merupakan hasil kolektif dari jejaring agen manusia dan nonmanusia yang saling berkelindan, sehingga tanggung jawab tidak lagi dapat dilekatkan pada satu titik tunggal.¹³ Santoni de Sio dan Mecacci memperdalam persoalan ini dengan menunjukkan bahwa *responsibility gap* sesungguhnya bukan satu fenomena tunggal, melainkan setidaknya empat jenis gap yang berbeda, mencakup gap budaya, moral, hukum, dan teknis, yang masing-masing memerlukan pendekatan berbeda, namun tidak satu pun di antaranya menawarkan penutup regres yang final.¹⁴

Dari uraian ini terlihat jelas bahwa kerangka sekuler, mulai dari Aristoteles hingga Floridi, secara konsisten berhasil mendiagnosis persoalan, namun gagal menyediakan titik henti (*stopping point*) yang final dalam rantai tanggung jawab. Setiap upaya melacak tanggung jawab, dari pengembang ke korporasi, dari korporasi ke regulator, dari regulator ke pengguna, pada akhirnya kembali menemui jalan buntu yang sama, yaitu tidak adanya subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak dan final.

¹⁰ Peter A. French, "The Corporation as a Moral Person," *American Philosophical Quarterly* 16, no. 3 (1979): 207-215.

¹¹ Floridi and Sanders, "On the Morality of Artificial Agents."

¹² Matthias, "The Responsibility Gap."

¹³ Floridi, "Distributed Morality in an Information Society."

¹⁴ Sio and Mecacci, "Four Responsibility Gaps"

Eksegesis Roma 14:12: Akuntabilitas Personal di Hadapan Subjek Moral Transenden

Roma 14 merupakan bagian dari nasihat praktis Paulus mengenai relasi antara jemaat yang kuat dan yang lemah dalam iman, khususnya terkait perbedaan pandangan tentang makanan dan hari-hari tertentu. Douglas Moo mencatat bahwa argumen Paulus dalam pasal ini bergerak dari larangan saling menghakimi (ay. 1-4) menuju penegasan bahwa setiap orang hidup dan mati bagi Tuhan (ay. 7-9), sebelum berpuncak pada penegasan eskatologis di ayat 10-12 bahwa semua orang akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah.¹⁵ Struktur argumen ini penting, karena menunjukkan bahwa Roma 14:12 bukan sekadar pernyataan moral yang berdiri sendiri, melainkan puncak logis dari keseluruhan argumen Paulus tentang otoritas Allah atas hidup setiap orang percaya.

Secara gramatikal, ayat 12 berbunyi, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah (Rm. 14:12)." Frasa "setiap orang di antara kita" (*hekastos hemon*) menegaskan sifat individual dan tidak terwakilkan dari pertanggungjawaban ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi pertanggungjawaban atas nama orang lain, dan tidak ada satu pun struktur kolektif, baik keluarga, jamaah, maupun korporasi, yang dapat menyerap pertanggungjawaban personal tersebut ke dalam dirinya. Ini berbeda secara mendasar dari kerangka French mengenai korporasi sebagai agen moral kolektif, yang memungkinkan tanggung jawab individu larut dalam struktur pengambilan keputusan korporat.

Kata kerja "memberi pertanggungjawaban" (*logon dosei*) berasal dari akar kata yang sama dengan istilah akuntansi, yang secara harfiah berarti menyerahkan perhitungan atau laporan. Paulus menegaskan ide ini lebih eksplisit dalam 2 Korintus 5:10, bahwa setiap orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya (2Kor. 5:10). Kedua teks ini bersama-sama membangun apa yang dapat disebut "akuntabilitas personal eskatologis," yaitu keyakinan bahwa pertanggungjawaban moral setiap individu tidak akan pernah larut ke dalam sistem kolektif apa pun, karena pada akhirnya setiap orang akan berdiri sendiri di hadapan Allah sebagai hakim yang mengetahui secara utuh niat, tindakan, dan konsekuensinya.

Poin krusial bagi argumen artikel ini adalah bahwa Allah, sebagai subjek penerima pertanggungjawaban, bukan merupakan salah satu simpul dalam jejaring aktor manusia, melainkan berada di luar sistem tersebut secara ontologis. Berbeda dari regulator, penguna, atau korporasi lain yang secara prinsip dapat saling melempar tanggung jawab karena masing-masing juga merupakan bagian dari sistem yang sama, Allah, dalam kerangka Roma 14:12, berdiri sebagai subjek moral transenden yang tidak dapat direduksi menjadi salah satu pihak yang turut bertanggung jawab. Posisi transenden inilah yang secara struktural menutup kemungkinan regres tanpa akhir, karena rantai pertanggungjawaban tidak lagi memerlukan simpul berikutnya untuk dilacak. Ia berhenti pada subjek yang berada di luar sistem itu sendiri.

Perlu dicatat pula bahwa kerangka akuntabilitas eskatologis ini tidak bersifat deterministik dalam arti fatalistik. Thomas Schreiner menegaskan bahwa pengadilan Allah dalam teologi Paulus tidak meniadakan tanggung jawab manusia dalam sejarah, melainkan justru memperkuatnya, karena kesadaran akan penghakiman akhir mendorong keserius-

¹⁵ Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 1-12.

an moral dalam setiap keputusan yang diambil di masa kini.¹⁶ Dalam konteks bisnis berbasis AI, implikasinya adalah bahwa keyakinan eskatologis tidak menjadi alasan pasif untuk menunggu pertanggungjawaban di hadapan Allah, melainkan menjadi energi aktif yang mendorong pelaku bisnis Kristen untuk bertindak benar sejak keputusan algoritmik dirancang, diterapkan, dan dievaluasi.

Dialog Kritis: Subjek Moral Transenden sebagai Penutup Regres

Mempertemukan kedua kerangka di atas menghasilkan pengamatan yang penting. Kerangka sekuler, baik Aristotelian, Kantian, maupun korporat menurut French, seluruhnya beroperasi dalam bidang horizontal, yaitu relasi antaraktor dalam sistem yang sama, baik individu, korporasi, maupun regulator. Ketika Floridi dan Matthias menunjukkan bahwa sistem AI merusak asumsi dasar dari ketiga kerangka tersebut karena tidak ada satu titik tunggal yang dapat menjadi sumber tindakan yang sepenuhnya dapat diprediksi, maka konsekuensi logisnya adalah tanggung jawab terus menyebar secara horizontal tanpa pernah menemukan titik henti yang final. Ini adalah struktur regresi tanpa akhir yang secara filosofis dikenal sebagai "infinite regress", yaitu kondisi ketika setiap penjelasan atau pertanggungjawaban memerlukan penjelasan atau pertanggungjawaban lain sebagai dasarnya, tanpa pernah mencapai fondasi akhir yang berdiri sendiri.

Kontribusi khas etika Kristen, sebagaimana ditunjukkan melalui eksegesis Roma 14:12, bukan terletak pada penyediaan mekanisme horizontal tambahan, seperti audit trail yang lebih ketat atau regulasi yang lebih komprehensif, karena hal tersebut memang penting, tetapi tetap beroperasi dalam bidang yang sama dengan kerangka sekuler dan karenanya tetap rentan terhadap regres. Kontribusi distingtifnya justru terletak pada penyediaan sumbu vertikal yang secara ontologis berbeda dari seluruh jejaring horizontal tersebut. Allah sebagai hakim akhir tidak bersaing dengan regulator atau korporasi sebagai simpul tambahan dalam jejaring yang sama, melainkan berdiri di luar jejaring itu sebagai subjek yang menerima pertanggungjawaban dari setiap simpul secara personal dan langsung.

Implikasi teologis ini tidak menafikan pentingnya tata kelola AI yang baik, tata kelola korporat yang transparan, maupun regulasi hukum yang memadai. Sebaliknya, ia menempatkan seluruh mekanisme horizontal tersebut dalam kerangka yang lebih besar, yaitu keyakinan bahwa setiap pelaku bisnis, mulai dari pengembang algoritma, pengambilan keputusan korporat, hingga eksekutif yang menyetujui penerapan sistem tersebut, pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya bersembunyi di balik argumen bahwa sistemlah yang membuat keputusan. Argumen ini secara teologis kehilangan daya di hadapan keyakinan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah, tanpa kemungkinan pengalihan kepada sistem, algoritma, atau struktur kolektif apa pun.

Implikasi Praktis bagi Pelaku Bisnis Kristen di Era AI

Kerangka teologis di atas dapat diterjemahkan menjadi beberapa prinsip operasional bagi pelaku bisnis Kristen yang menerapkan sistem AI dalam pengambilan keputusan. Pertama, prinsip human in the loop yang bertanggung jawab secara personal dan dapat diidentifikasi, bukan sekadar *disclaimer* hukum yang melindungi korporasi secara kolektif. Setiap keputusan algoritmik yang berdampak signifikan pada manusia, seperti penolakan pinjaman atau pemutusan kontrak kerja, semestinya memiliki penanggung jawab perso-

¹⁶ Thomas R. Schreiner, *Romans*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 1998), 728-730.

nal yang dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, bukan hanya menunjuk pada output sistem.

Kedua, prinsip transparansi berakar pada keyakinan eskatologis, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku bisnis Kristen didorong untuk bersikap transparan bukan karena takut sanksi hukum semata, melainkan karena kesadaran bahwa setiap keputusan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebuah motivasi yang secara prinsip lebih tahan lama dibandingkan motivasi kepatuhan eksternal semata.

Ketiga, prinsip kehati-hatian dalam mendelegasikan keputusan bermuatan moral tinggi kepada sistem otomatis. Mengingat keterbatasan epistemik manusia dalam memprediksi perilaku sistem pembelajaran mesin sebagaimana ditunjukkan Matthias, pelaku bisnis Kristen semestinya menahan diri untuk sepenuhnya mendelegasikan keputusan yang berdampak besar pada martabat dan kesejahteraan manusia kepada algoritma, beta-pun pun canggih sistem tersebut secara teknis.

Keempat, prinsip pembentukan karakter (*virtue formation*) merupakan fondasi etika bisnis berbasis AI yang berkelanjutan. Kerangka akuntabilitas eskatologis dalam Roma 14:12 tidak dimaksudkan semata-mata sebagai mekanisme eksternal yang mengawasi dari luar, melainkan sebagai motivasi internal yang membentuk karakter pelaku bisnis dari dalam. Dalam tradisi etika kebajikan (*virtue ethics*) yang bersumber dari Aristoteles, karakter yang baik tidak terbentuk melalui aturan semata, melainkan melalui kebiasaan bertindak benar yang dilakukan berulang kali hingga menjadi disposisi yang tetap.¹⁷ Bagi pelaku bisnis Kristen, implikasi praktisnya adalah perlunya membangun budaya organisasi yang secara konsisten melatih para anggotanya untuk mengajukan pertanyaan etis mendasar sebelum mengadopsi sistem AI: Apakah sistem ini dapat saya pertanggungjawabkan secara personal kepada mereka yang terdampak? Apakah saya bersedia menjelaskan logika keputusan ini kepada individu yang dirugikan? Pertanyaan semacam ini, yang berakar pada keyakinan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah, berfungsi bukan sebagai hambatan inovasi, melainkan sebagai penyaring moral yang mencegah adopsi sistem algoritmik yang secara teknis efisien namun secara etis meragukan.

Kelima, prinsip solidaritas terhadap pihak yang paling rentan terdampak oleh sistem algoritmik. Ketika Paulus menulis Roma 14 dalam konteks relasi antara yang kuat dan yang lemah dalam jemaat, ia menekankan bahwa kekuatan tidak memberi hak untuk mengabaikan dampak tindakan terhadap pihak yang lebih rentan. Dalam konteks bisnis berbasis AI, mereka yang paling rentan adalah individu yang keputusannya ditentukan oleh algoritma tanpa memiliki daya untuk mempertanyakan atau mengajukan banding, seperti pencari kerja yang ditolak oleh sistem rekrutmen otomatis, atau nasabah yang ditolak pinjaman tanpa penjelasan yang memadai. Shoshana Zuboff, dalam analisisnya tentang kapitalisme pengawasan, menunjukkan bahwa asimetri informasi antara pemilik sistem algoritmik dan individu yang terdampak menciptakan ketidakadilan struktural yang sistemik.¹⁸ Pelaku bisnis Kristen terdorong untuk secara proaktif menyediakan mekanisme banding yang dapat diakses, penjelasan yang dapat dipahami oleh individu yang terdampak, serta audit reguler terhadap bias sistemik yang mungkin tersembunyi dalam dataset pelatihan. Langkah ini bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan ekspresi nyata dari keyakinan bahwa setiap manusia adalah gambar Allah (*imago Dei*) yang martabatnya

¹⁷ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, 2nd ed. (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), Book II.1, 1103a17-1103b2.

¹⁸ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019), 376-395.

tidak dapat direduksi menjadi variabel dalam fungsi optimasi algoritmik. Dengan demikian, kelima prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka etika bisnis berbasis AI yang berpijak pada fondasi teologis yang konsisten: akuntabilitas personal di hadapan Allah yang menutup setiap kemungkinan pengalihan tanggung jawab kepada sistem, struktur, atau kolektivitas apa pun.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka moral agency sekuler, mulai dari tradisi Aristotelian dan Kantian, perluasannya ke ranah korporasi melalui gagasan French, hingga diagnosis kontemporer Floridi dan Matthias mengenai *distributed morality* dan *responsibility gap*, secara konsisten berhasil mendiagnosis krisis akuntabilitas dalam bisnis berbasis AI, namun gagal menyediakan titik henti final bagi rantai tanggung jawab tersebut. Melalui eksegesis Roma 14:12, artikel ini berargumen bahwa etika Kristen menawarkan kontribusi distingtif berupa subjek moral transenden, yaitu Allah sebagai hakim akhir yang berdiri di luar jejaring horizontal aktor bisnis, sehingga secara ontologis menutup regres tanpa akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh kerangka sekuler mana pun. Kerangka ini tidak menggantikan mekanisme hukum dan tata kelola AI yang ada, melainkan menyediakan fondasi teologis yang menahan pelaku bisnis dari kemungkinan bersembunyi di balik neutralitas algoritma. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan kerangka ini secara empiris pada studi kasus bisnis berbasis AI dalam konteks Indonesia, khususnya pada sektor *fintech* dan *gig economy* yang telah menunjukkan gejala *responsibility gap* secara nyata.

REFERENSI

- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by Terence Irwin. 2nd ed. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.
- Fee, Gordon D. *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors*. 3rd ed. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.
- Floridi, Luciano. "Distributed Morality in an Information Society." *Science and Engineering Ethics* 19, no. 3 (2013): 727–743.
- Floridi, Luciano, and J. W. Sanders. "On the Morality of Artificial Agents." *Minds and Machines* 14, no. 3 (2004): 349–379.
- French, Peter A. "The Corporation as a Moral Person." *American Philosophical Quarterly* 16, no. 3 (1979): 207–215.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Matthias, Andreas. "The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata." *Ethics and Information Technology* 6, no. 3 (2004): 175–183.
- Moo, Douglas J. *The Epistle to the Romans*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1996.
- Pertiwi, Endah, et al. *Hukum dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia*. Jakarta: PT Arunika Aksa Karya, 2025.
- Rismayadi, D. A., et al. *Algoritma dan Data Driven Decision Making dalam Bisnis*. Alungcipta, 2025.
- Santoni de Sio, Filippo, and Giulio Mecacci. "Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why They Matter and How to Address Them." *Philosophy & Technology* 34, no. 4 (2021): 1057–1084.

Schreiner, Thomas R. *Romans*. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, 1998.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019